

Eksplorasi Dan Pemahaman Pola Dari Faktor Yang Terjadi Di Perusahaan Mengenai Tindak Kejahatan Fraud Pada Perusahaan

Claudio Ghoklas

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: claudioghoklas@gmail.com

Abstrak

Biaya ekonomi atas praktik kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan terus menjadi masalah bagi organisasi dan masyarakat. Sejak Maret 2020 hingga saat ini, hampir 200.000 laporan fraud telah diterima. Ini menunjukkan data penting bahwa Indonesia darurat tindak kejahatan Fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan terjadinya fraud, upaya dalam pencegahan fraud, dan bagaimanakah peranan audit internal, pemerintah dan pihak yang terkait dalam pencegahan fraud pada suatu perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Alasan terjadinya Fraud (2) peranan audit internal, Pemerintah dan Pihak yang terkait untuk berperan dalam pencegahan fraud, (3) dimana unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedepannya integritas pada diri SDM-lah yang dituntut untuk dapat mencegah risiko fraud atau dalam perekrutan SDM lebih dievaluasi pada nilai integritas calon pegawai guna mendapatkan SDM yang unggul dan dapat dipercaya sehingga dapat menurunkan tingkat risiko fraud

Kata Kunci : *Fraud, Audit internal, Pencegahan fraud*

Abstract

The economic costs of fraudulent practices (fraud) in financial reports continue to be a problem for organizations and society. Since March 2020 until now, nearly 200,000 reports of fraud have been received. This shows important data that Indonesia is in an emergency for fraud. This study aims to analyze the reasons for fraud, efforts to prevent fraud, and what is the role of internal audit, government and related parties in preventing fraud in a company. This research is a qualitative research with a descriptive approach. research methods carried out by studying the literature and writings that have a close relationship with the problems raised in the research. While the data analysis technique used is descriptive analysis method. The results of this study found that (1) the reasons for the occurrence of fraud (2) the role of internal audit, the Government and related parties to play a role in preventing fraud, (3) where the elements of internal control that have been implemented have been carried out in accordance with existing regulations. In the future, it is integrity in HR that is demanded to be able to prevent the risk of fraud or in recruiting HR to be evaluated more on the integrity value of prospective employees in order to get superior and trustworthy HR so as to reduce the level of fraud risk.

Keywords : *Fraud, Internal audit, Fraud preventio*

PENDAHULUAN

Perusahaan maupun instansi memiliki tujuannya masing-masing namun berorientasi pada satu tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengamankan aset yang dimiliki untuk menjamin kepastian akan terhindarnya kerugian yang tidak diharapkan. Hal yang tidak diharapkan juga dapat terjadi oleh faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dari segi tindak kesengajaan tersebut menjadi sumber yang berdampak buruk atau merugikan bagi perusahaan maupun instansi akibat dari tindakan pelaku kecurangan.

Fraud atau penyimpangan internal adalah bahaya yang dapat terjadi pada sebuah perusahaan, termasuk tentu industri perbankan. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi perusahaan, pelanggan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan perusahaan. Fraud dapat terjadi pada siapapun, dan dapat dilakukan oleh siapapun. Mengapa orang melakukan fraud? Apa yang menyebabkan terjadinya fraud?

Kecurangan (Fraud) Menurut Tuanakotta (2013, hal.28) "setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi". Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berdasarkan tugasnya yaitu mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan dengan sesuai standar, melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit organisasi.

Audit internal juga melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya: menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal; memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen; memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan; dll. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa internal audit antara lain memiliki peranan dalam: pencegahan kecurangan (fraud prevention), pendeteksian kecurangan (fraud detection), penginvestigasian kecurangan (fraud investigation). (Amrizal, 2004)

The Institute of Internal Auditor (IIA) suatu organisasi auditor internal di Amerika Serikat, mendefinisikan kecurangan (fraud) adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Artinya adalah bahwa fraud merupakan kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013).

Selanjutnya, Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) menyatakan fraud sebagai kesalahan yang disengaja dan menyembunyikan fakta material, penghilangan bukti untuk melakukan kecurangan dan manipulasi yang merugikan keuangan suatu individu atau organisasi. Fraud meliputi penggelapan, pencurian, pemalsuan, penyalahgunaan, dan menghilangkan bukti dengan sengaja

(CIPFA, 2013). Secara umum dapat didefinisikan bahwa fraud adalah suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan fraud, termasuk kecurangan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya untuk mendefinisikan fraud adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia (Zimbelman, et.al., 2014).

Fraud dalam organisasi korporasi umumnya berasal dari dua arah, yaitu internal dan eksternal. Fraud internal adalah kecurangan yang berasal dari pihak dalam organisasi perusahaan itu sendiri, seperti korupsi, penyajian laporan palsu, rekayasa laporan keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan dalam penghitungan, pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh para pegawai dan manajemen untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan fraud eksternal yaitu kecurangan yang berasal dari pihak luar organisasi perusahaan, seperti penyuapan, peninggian nilai faktur, adanya faktur ganda serta penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan penyajian yang telah disepakati (Sayyid, 2014).

Kecurangan atas laporan (*fraudulent statement*) yaitu kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari yang sebenarnya (*under statement*) (Karyono, 2013), menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya, atau menyajikan aset dan pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (Tuanakotta, 2010), tindakan yang disengaja untuk menghasilkan materi laporan keuangan yang menyesatkan untuk menipu atau menggambarkan posisi keuangan organisasi yang salah (Albashrawi, 2016), membuat organisasi terlihat lebih atau kurang menguntungkan (Apostolou & Apostolou, 2012).

Sedangkan kecurangan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) adalah “mengambil” secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut (Tuanakotta, 2010). Dan korupsi (*corruption*) adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat terjadi pada organisasi korporasi swasta maupun pada sektor publik pemerintahan (Karyono, 2013).

Terdapat beberapa hal yang memotivasi manajemen menyajikan laporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan: (a) memberikan dukungan agar harga saham tetap tinggi; (b) memberikan dukungan terhadap obligasi dan saham; dan (c) memaksimalkan bonus bagi manajemen (Zimbelman, et. al., 2014). Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam manual edisi ketiga, aksioma fraud meliputi: 1) Tersembunyi, kecurangan ini dilakukan secara tersembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya; 2) Bukti sebalik, untuk membuktikan bahwa kecurangan yang terjadi harus diusahakan agar kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya; 3) Jenis-jenis fraud, yang terdiri dari intern fraud dan system control fraud. Intern fraud terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan. System control fraud terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang sistem kerja internal tersebut (Karyono, 2013). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang pelaku melakukan tindakan fraud.

Karena hampir setiap tindakan kriminal atau kejahatan selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Dalam pembahasan ini, peneliti membatasi hanya dengan menggunakan teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*) . Menurut teori ini, bahwa perilaku fraud

itu terlaksana atau dilakukan karena adanya tiga unsur, yaitu adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Teori yang pertama kali diformulasikan oleh kriminolog Donald R. Cressey (1950) ini, menyimpulkan bahwa penipuan umumnya terbagi dalam tiga ciri-ciri umum. Pertama, pelaku fraud yang memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan (opportunity). Kedua, pelaku fraud mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain (pressure). Ketiga, individu yang terlibat dalam fraud merasionalisasikan perbuatan curangnya konsisten dengan kode etik pribadi mereka (rationalization) (Cressey, 1950). Dan ketiga faktor fraud tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Skousen et. al. sebagai "triangle fraud" (Skousen et.al., 2009).

Tindakan fraud yang banyak terjadi dalam banyak bidang tidak terlepas karena adanya keinginan untuk mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok lalu menjadi pembenaran bahwa kecurangan merupakan hal biasa yang boleh dilakukan dan juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan dalam bidang akuntansi dapat terjadi dalam proses pengolahan data akuntansi yang tertuang dalam informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Jika faktor kecurangan terjadi dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat dipastikan laporan keuangan yang disajikan tidak wajar.

Kecurangan tidak hanya merusak hubungan kepercayaan antara manajemen dan investor namun juga akan menciderai nilai-nilai dari akuntansi itu sendiri. Kecurangan laporan keuangan memengaruhi berbagai pelaku pasar, termasuk investor, organisasi, dan karyawan. Sebagaimana penelitian sebelumnya memberikan informasi terkait dengan kerugian organisasi secara tidak langsung atas tindakan fraud. Selain kerugian material yang ditanggung organisasi, reputasi organisasi mungkin juga dipertanyakan ketika terjadi fraud. Kepercayaan investor pada organisasi akan hilang dan mungkin akan menarik seluruh simpanannya termasuk investasi, dan dana pensiun (Perols, 2011; Ugrin & Odom, 2010).

Fraud yang terjadi pada suatu organisasi adalah sebagai manifestasi klasik dari tata kelola organisasi yang lemah. Pada organisasi swasta dikenal adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Masalah ini muncul karena ketika pemilik (principal) memberikan wewenang kepada manajer (agent) untuk bertindak atas nama mereka. Yang pada dasarnya adalah karena perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara manajer dan pemilik. Masalah ini dapat dihilangkan jika kedua pihak memiliki kepentingan yang sama (Jensen & William, 1976).

Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi kecurangan yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. Corporate governance merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor. Badan pengelola pasar modal di banyak negara menyatakan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan publik secara baik telah berhasil mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Chen, et. al., 2005).

Banyak upaya untuk mencegah praktik kecurangan yang telah dilakukan berdasarkan teori maupun penelitian yang ada, dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya adalah mencegah kecurangan dengan menerapkan manajemen risiko, yang menggambarkan bahwa risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan suatu ketidakpastian, atau suatu kejadian atas kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam mencapai tujuan (Susilo & Victor, 2019). Dalam upaya pencegahan kecurangan, manajemen harus melakukan suatu proses pengelolaan sumber daya organisasinya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang

sebelumnya telah diidentifikasi, diukur dan dipikirkan bagaimana penanganannya (Karyono, 2013). Setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidak pastian yang identik dengan risiko termasuk risiko adanya kecurangan (fraud), sehingga manajemen harus bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang akan dihadapi.

Landasan utama dalam pelaksanaan program pencegahan fraud yang efektif di organisasi adalah dengan melaksanakan proses penilaian risiko secara menyeluruh. Konsep dasar penilaian risiko fraud adalah penilaian keterjadian dan dampak atas risiko yang telah teridentifikasi. Di dalam Committee of Sponsoring Organizations of the Threadway Commission, terdapat beberapa tahapan dalam proses penilaian risiko fraud diantaranya: (a) membentuk tim penilai risiko yang melibatkan tingkatan manajemen yang tepat; (b) mengidentifikasi potensi risiko fraud organisasi dengan menilai risiko pada seluruh tingkatan organisasi dan yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal, mengakomodir berbagai jenis fraud serta mempertimbangkan terjadinya management override control; (c) menilai kemungkinan dan signifikansi atas masing-masing risiko fraud yang telah teridentifikasi; (d) menentukan karyawan dan departemen yang berpotensi terlibat berdasarkan fraudtriangle; (d) mengidentifikasi kontrol yang ada dan menilai keefektifannya; (e) menilai dan merespon risiko fraud residual yang perlu dimitigasi; (f) mendokumentasikan penilaian risiko fraud; (g) menilai risiko fraud kembali secara periodik (COSO, 2017). Dan Fraud Risk Assessment (FRA) adalah prosedur unik untuk membedakan dan mengevaluasi risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi (Huber, et. al., 2015).

Selanjutnya, Popoola berpendapat bahwa pelaksanaan fraud risk assessment (FRA) memerlukan perubahan dan proses siklus yang berulang untuk dapat mengidentifikasi dan menilai risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi. Penilaian atas risiko kecurangan menuntut agar mempertimbangkan atas perubahan lingkungan eksternal dan dampaknya dalam model aktivitas, yang tujuannya adalah sebagai kontrol atas aktivitas internal yang tidak efektif. Penilaian atas risiko kecurangan dianggap sebagai alat yang efektif untuk pencegahan fraud dan karena dengan sarana ini dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam mencari, mendeteksi dan mencegah fraud (Popoola, et.al., 2016).

Dalam teori manajemen risiko menyebutkan bahwa perlakuan terhadap risiko dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu: 1) menghindari risiko, artinya dengan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mendatangkan risiko; 2) mengurangi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya dan mengurangi konsekuensi atau dampaknya; 3) mentransfer risiko, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain untuk menanggung risikonya; 4) menerima risiko, artinya tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atas kompensasi risiko yang harus diambil; dan 5) mengeksploitasi risiko, yaitu tindakan untuk mengambil risiko dalam pilihan-pilihan lain yang merupakan hasil keputusan proaktif dan dilakukan secara sadar untuk mengambil risiko yang baru karena memiliki area-area yang lebih unggul (Susilo & Victor, 2019).

Langkah atau proses yang dilakukan dengan cara sistematis untuk mengelola (to manage) ancaman risiko dikenal dengan manajemen risiko (risk management) (Siahaan, 2009). Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 9, issue 2 Juni, 2020, Page 107-121 Page 113 Sedangkan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 terdiri tiga proses besar, yang meliputi: (1) penetapan konteks, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi; (2) penilaian risiko, yang terdiri identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko; (3) penanganan risiko, yang terdiri: menghindari risiko, mitigasi risiko, transfer risiko, dan menerima risiko. Ketiga proses besar tersebut

didampingi oleh dua proses, yaitu: (a) Komunikasi dan konsultasi; dan (b) Monitoring dan revidi (Susilo & Victor, 2019; Suwanda, et. al., 2019).

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui library research, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian (Baidan, 2016), melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Kisworo & Iwan, 2017). Sedangkan sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari karya-karya penelitian ilmiah terdahulu yang relevan, berupa buku-buku serta karya ilmiah lainnya dengan berbagai sudut pandang. Sedangkan data yang digunakan adalah berbagai data kualitatif yang terjaga kualitasnya yang berbentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2011) yang berasal dari berbagai sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fraud pada umumnya dapat terjadi karena sejumlah alasan yang umumnya disebut sebagai the fraud triangle. Ketiga alasan itu adalah adanya tekanan, adanya peluang, dan adanya rasionalisasi.

Tekanan

Tekanan adalah situasi dimana seorang menyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud. Tekanan ini misalnya karena kondisi kesulitan ekonomi seorang karyawan yang mendorong karyawan melakukan fraud. Faktor kesejahteraan karyawan harus menjadi perhatian penting dari manajemen untuk mengikis dorongan atau motivasi karyawan untuk melakukan fraud.

Memang betul tidak ada jaminan bahwa karyawan yang sejahtera sekalipun tidak akan melakukan fraud. Dan karyawan yang merasa tidak sejahtera juga akan melakukan fraud. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi setidaknya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, selain diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya fraud, diharapkan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik.

Peluang

Peluang adalah situasi dimana seseorang menyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong kemungkinan seorang karyawan untuk melakukan fraud, bahkan disaat karyawan tersebut tidak memiliki tekanan untuk melakukan fraud. Jadi teringat dengan ucapan bang napi, seorang tokoh rekaan dalam salah satu acara televisi swasta beberapa waktu lalu :

Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya. Tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Waspadalah!” – Bang Napi

Ucapan ini benar adanya. Sistem kerja, mekanisme kerja yang longgar, bahkan hubungan kekeluargaan yang kelewat akrab dalam satu perusahaan dapat mendorong karyawan untuk terpikir bahwa ada peluang untuk melakukan fraud. Acapkali yang dicurigai melakukan fraud adalah karyawan yang sudah terlalu lama berada di satu unit kerja tertentu. Hal ini dapat dimaklumi karena karyawan tersebut bisa jadi sudah mengetahui celah-celah dari sistem dan mekanisme kerja, ataupun peluang-peluang untuk melakukan fraud tanpa ketahuan. Tapi acapkali juga fraud dilakukan oleh

karyawan baru. Jadi masalahnya bukan pada lama atau sebetulnya bekerja, tetapi kembali kepada pribadi masing-masing.

Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan fraud merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi jika tidak adanya penegakan hukum yang tegas, atau terjadi pembiaran dalam melakukan fraud. Atau barangkali jika karyawan mengetahui bahwa rekan-rekannya melakukan fraud maka dia akan merasa sah-sah saja untuk melakukan fraud.

Peran audit internal adalah **sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan**. Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen. **Audit internal** membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan. **Peranan audit internal** ini sangat besar kontribusinya di dalam perusahaan.

Sawyer (2005:32) menyebutkan fungsi audit intern bagi manajemen adalah:

- a. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak
- b. Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko
- c. Memvalidasi laporan ke manajer senior
- d. Membantu manajemen pada bidangbidang teknis
- e. Membantu proses pengambilan keputusan
- f. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu
- g. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan

Menurut COSO Framework, pengendalian internal atau internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Kelima komponen/elemen tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

2. Penaksiran Risiko (Risk Assessment)

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

5. Pemantauan (Monitoring)

Sedangkan peranan pemerintah dan pihak terkait adalah Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun (2010) , “Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawas yang lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008b) , APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi lembaga pemerintah termasuk pertanggungjawaban keuangan negara. APIP melakukan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Aparat pengawasan intern terdiri dari:

- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
- c. Inspektorat Provinsi
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Badan Pegawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun (2008a) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern pada akuntabilitas keuangan negara pada kegiatan tertentu”, yang meliputi: 1. Kegiatan lintas departemen 2. Kegiatan kebendaharaan umum sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 3. Kegiatan lain yang diberikan oleh Presiden, penugasan tersebut berbeda dengan tanggung jawab APIP di Kementerian/Lembaga/Pemda.

Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008b), peran Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan internal yang meliputi audit, reviu, pelaksanaan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan yang lainnya terhadap tanggung jawab dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan secara efektif dan efisien sebagai wujud tanggung jawab pimpinan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008b), menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota bertanggung jawab terhadap efektivitas sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Dalam memperkuat dan untuk menunjang efektivitas sistem pengendalian internal dilakukannya:

1. Pengawasan internal atas tugas dan fungsi organisasi
2. Pembinaan dalam mendukung terselenggaranya sistem pengendalian internal pemerintah.

Inspektorat Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan Wali Kota Tarakan nomor 27 tahun (2020a) tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, “Inspektorat Kota Tarakan adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kota Tarakan”. Inspektorat Kota Tarakan mempunyai peran dalam proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Kota Tarakan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tarakan. Inspektorat melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

SIMPULAN

Untuk mengeksplorasi dan memahami pola dan tema yang relevan dari deteksi dini terhadap fraud laporan keuangan, literatur yang terkait adalah tentang bahasan motivasi, niat, tanggung jawab, dan pencegahan fraud. Sebagian besar literatur berfokus pada segitiga fraud sebagai konsekuensi dari beberapa kasus fraud yang terjadi sebelumnya. Banyak literatur yang berfokus pada kontrol internal dan tata kelola perusahaan dalam kaitannya dengan proses audit, termasuk kebutuhan untuk peninjauan kembali terhadap kontrol internal dan penilaian risiko yang direncanakan sebagai bagian dari proses audit. Beberapa peneliti mempelajari kemampuan auditor untuk mengenali kecurangan dan menetapkan bahwa dibutuhkan lebih banyak pelatihan bagi auditor

untuk mengetahui motivasi seseorang melakukan kecurangan. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pencegahan fraud secara proaktif, karena pencegahan yang proaktif membutuhkan kontrol yang memadai dan etika budaya yang baik dalam perusahaan. Terdapat temuan bahwa metode deteksi kecurangan saat ini masih kurang memadai. Selain fokus pada proses audit, penelitian juga dilakukan terhadap internal kontrol dan tata kelola perusahaan. Fokus lainnya adalah pada aspek etika dan perilaku budaya perusahaan, untuk pengembangan model deteksi fraud dan beberapa strategi pencegahan yang direkomendasikan. Termasuk sejauh mana tanggung jawab audit untuk mendeteksi dalam persepsi auditor tentang pencegahan fraud. Dan rekomendasi lainnya adalah kurangnya konsensus peran auditor dalam mendeteksi dan mencegah fraud, serta masih terbatasnya penelitian kualitatif yang terkait. Meskipun banyak literatur tentang fraud atas laporan keuangan, masih terdapat kesenjangan terkait dengan pencegahan yang proaktif. Yaitu ditemukannya celah konsep manajemen risiko dalam praktik saat ini untuk mendeteksi dan mencegah fraud, serta bagaimana perspektif auditor dalam mendeteksi kecurangan dan membuat model yang proaktif guna mendeteksi dan mencegah fraud. Selain itu, praktisi juga dapat menggunakan informasi ini dalam mengembangkan prosedur manajemen risiko yang proaktif guna pencegahan fraud, dan bagi auditor mungkin dapat mengembangkan pedoman untuk deteksi dini fraud dalam pengawasan terhadap risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., Mansor N., Nuhu M.S. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory, Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 5 (4)(Accounting), 38–45.
- Albashrawi, M. (2016). Detecting financial fraud using data mining techniques: A decade review from 2004 to 2015. *Journal of Data Science*, 14 (3), 553–569.
- Anggarwal, R., Erel, I., Stulz, R., & Williamson, R.. (2009). Differences in governance practices between U.S. and foreign firms: Measurement, causes, and consequences. *Review of Financial Studies*, 22 (8)(Management), 3131–3169.
- Apostolou, B & Apostolou, N. (2012). *The value of risk assessment: Evidence from recent surveys*. <http://www.theforensicexaminer.com/> diunduh 5 Mei 2020.
- Baidan, Nashruddin & Erwati Aziz. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chartered Institute of Public Finance Accountancy (CIPFA). (2013). *The Investigation of Fraud in the Public Sector* (12th ed.).
- Chen, G., Firth M. & Gao N.D. (2005). Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China. *Elsevier: Journal of Corporate Finance*, 12, 424–448.
- Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission . (2017). *Fraud Risk Management Guide*. <https://www.coso.org/Documents/COSO-%09Fraud-%09Risk-Management-GuideExecutive-Summary.pdf> diunduh 27 April 2020.
- Cressey, Donald. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15 (6), 738–743.
- Crockford, G.N. (2005). The changing face of risk management (first published in 1976 in The Geneva Papers). *Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice*, 30 (1), 5–10.
- Dechow, P.M., Hutton A.P., Kim J.H. & Sloan R.G. (2012). Detecting Earning Management: A New Approach. *Journal of Accounting Research*, 50

(2), 275–334.

- Enofe, A., Amaria, P., & Hope, M. (2013). The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection. *European Journal of Business and Management*, 5 (26), 61–72.
- Fleming, A. S., Riley Jr., R. A., Hermanson, D. R., & Kranacher, M.J. (2016). Financial reporting fraud: Public and private companies. *Journal of Forensic Accounting Research*, 1 (1), A27–A41.
- Gilbert, M. & Wakefield, A. (2018). Tackling fraud effectively in central government departments: A review of the legal powers, skills and regulatory environment of UK central government counter fraud teams. *Journal of Financial Crime*, 25 (2), 384–399.
- Huber, W.D., O.J. Popoola, A. Che-Ahmad, Rose S. Samsudin. (2015). An empirical investigation of fraud risk assessment and knowledge requirement on fraud related problem representation in Nigeria. *Accounting Research Journal*, (10) 1, 40–70.
- Jensen, Michael C. & William H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3.
- Johnson, E.N., Kuhn, J. R., Apostolou, B. A., & Hassell, J. M. (2013). Auditor perceptions of client narcissism as a fraud attitude risk factor. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32 (1), 203–219.
- Kang, E. (2008). Director interlocks and spillover effects of reputational penalties from financial reporting fraud. *Academy of Management Journal*, 51 (3), 537–555.
- Karyono.(2013).*Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Klarskov, Jeppesen K., & Leder, C. (2016). Auditors' experience with corporate psychopaths. *Journal of Financial Crime*, 23 (4), 870–881.
- Kostova, S. (2013). Audit procedures for disclosure of errors and fraud in financial statements. *Economic Themes*, 51 (2), 355–375.
- Kranacher, M.J. & Stern, L. (2004). Enhancing fraud detection through education. *CPA Journal*, 74 (11), 66–67.
- Kurniasari, Novia Tri. (2017). *Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Institut Pertanian Bogor.
- Lister, L.M. (2007). A practical approach to fraud risk. *Internal Auditor*, 64 (6), 61–65.
- Mehr, R. I., & Forbes, S. W. (1973). The risk management decision in the total business setting. *Journal of Risk & Insurance*, 40 (3), 389–401.
- Moeller, Robert R. (2014). *COSO Internal Control-Understanding and Implementing the New Framework*.
- John Wiley & Son.Ng, J., White, G., Lee, A., & Moneta, A. (2009). *Design and validation of a novel new instrument for measuring the effect of moral intensity on accountants' propensity to manage earnings*. (Report No. 1674544). Springer Science & Business Media B.V. h. 367–387.
- Nicolaescu, E. (2013). Internal auditors' role in detecting fraud. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, (1), 106.
- Ovidiu-Constantin, B., Alin-Constantin, D., & Madalina, D. R. (2010). Risk management's importance and role in audit. *Annals of The University of Oradea, Economic Science Series*, 19(1), 484–489.
- Perols, J. (2011). Financial statement fraud detection: An analysis of statistical and machine learning algorithms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 30 (2)(19– 50).
- Philmore, A., & Michael, H. (2005). An exploratory study of auditors' responsibility for fraud

- detection in Barbados. *Managerial Auditing Journal*, 20 (3), 284–303.
- Popoola, O.J., Ayoib B. Che-Ahmad, Rose S. Samsudin, K. Salleh, Dorcas A. Babatunde. (2016). Accountants' capability requirements for fraud prevention and detection in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6, S4, 23–34.
- Robu, M.A. (2015). Study on increasing value relevance of accounting information by IFRS. *Audit Financial*, 13 (123), 100–110.
- Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al_Banjari*, 13 (2), 137–162.
- Shafer, W.E. (2002). Effects of materiality, risk, and ethical perceptions on fraudulent reporting by financial executives. *Journal of Business Ethics*, 38 (3), 243–262.
- Siahaan, Hinsa. (2009). *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi* (Buku 1). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Simeunović, N., Grubor, G., & Ristić, N. (2016). Forensic accounting in the fraud auditing case,. *European Journal of Applied Economics*, 13 (2), 4.
- Simha, A., & Satyanarayan, S. (2016). Straight from the horse's mouth: Auditors' on fraud detection and prevention, roles of technology, and white-collars getting splattered with red! *Journal of Accounting & Finance* (2158- 3625), 16 (1), 26–44.
- Skousen, C.J., Smith K.R., Wright C.J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*, 13, 53–81.
- Snider, H.W. (1990). The importance of objectives in risk management. *Risk Management* (00355593), 37 (1), 38–39.
- Snider, H.W. (1991). Risk management: A retrospective view. *Risk Management* (00355593), 38 (4), 47–54.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfa Beta.
- Surjandari, DA, Martaningtyas I. (2015). An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, or Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (5), 71–76.
- Suwanda, D., Burhan A.J., Azhar A., Ellen R. (2019). *Manajemen Risiko –Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2008). *The Report to The Nation on a Occupational Fraud and Abuse*. Texas: Austin.
- The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2020). *Report to Nation 2020*. [https://www.acfe.com/uploadedFiles/AC F](https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE%20Report%20to%20the%20Nation%202020.pdf) diunduh 19 April 2020.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigative* (Ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Ugrin, J. C. & Odom, M. D. (2010). Exploring Sarbanes–Oxley's effect on attitudes, perceptions of norms, and intentions to commit financial statement fraud from a general deterrence perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29 (5), 439–458.
- Webster's New York Dictionary. (1964). College Edition (Cleveland and New York). In *Webster's New York Dictionary*. World Publishing. (p. 380).
- Zimbelman, Mark F., Conan C. Albrecht, W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht. (2014). *Akuntansi Forensik (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat